

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Algra, N.E., 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota. 2017. *Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka 2017*. Sarilamak :BPS Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, (makalah disampaikan di Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 13 Mei 2000)
- Henry Campbell Black. 1990. *Black's Law Dictionary*. Cincinnati : Ohio Publishing Co.
- J.Kaloh. 2010. *Kepemimpinan Kepala Daerah (Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Sinar Grafika : Jakarta.
- J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Jum Anggriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kuntjoro Purbopranoto. 1981. *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, Bandung:Bina Cipta.
- Muhammad Fauzan. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1970. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional* Jakarta : PT Binacipta
- Philippus M. Hadjon dkk. 1997. *Pengantar Huku Administrasi Negara* . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Siswanto Sunarno,. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah* . Jakarta : Sinar Grafika.

Siswanto Sunaryo. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI Pers).

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Utrecht. 1997. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan ke empat, Jakarta: Balai Buku Ichtiar

Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

JURNAL

Abdul Rokhim, “Kewenangan Pemerintahan dalam Konteks Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) “ Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum FH Unisma Malang, Vol. XIX No. 36, Pebruari-Mei 2013.

Akhmad Marwi, “Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram)” *Jurnal Ius*, Vol. IV No. 3, 3 Desember 2016.

inlislite.uin-suska.ac.id diunduh pada tanggal 16 September 2018

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- 10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 11) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K-26-30/V.20-3/99 tertanggal 5 Februari 2016.
- 12) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K-26-3/V.5-10/99 tertanggal 18 Januari 2002
- 13) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 130/ 201/Pem-2017
- 14) Surat Keputusan Plh Bupati Lima Puluh Kota Nomor 130/23/TAPUM-2017.

WEBSITE

<http://wikipns.com/apa-pengertian-pns/> [22 /04/18]

<https://sumbar.antarane.ws.com/berita/201954/sekilas-tentang-sejarah-kabupaten-limapuluh-kota>, tanggal 01 Januari 2019 pukul 17.23

